

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* DAN KEMAMPUAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA  
BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)*



**Oleh:**

**DELLA JESICA**

**15060017/2015**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

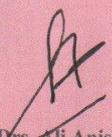
**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  
ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* DAN KEMAMPUAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA  
BARAT

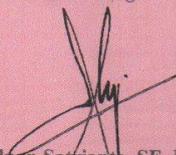
Nama : Della Jesica  
NIM/TM : 15060017/2015  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Disetujui Oleh:  
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

  
Dr. Ali Anis, MS  
NIP. 19591129 198602 1001

Diketahui Oleh:  
Pembimbing

  
Dr. Alpon Satrianto, SE, ME  
NIP. 19850909 201404 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

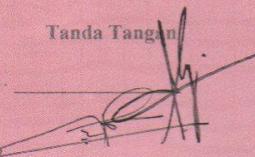
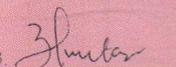
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* DAN KEMAMPUAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

Nama : Della Jesica  
NIM/TM : 15060017/2015  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Alpon Satrianto, S.E, M.E	1. 
2	Anggota	Drs. Zul Azhar, M.Si	2. 
3	Anggota	Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Della Jesica  
NIM / TahunMasuk : 15060017/2015  
Tampat / Tanggal Lahir : Padang/11 Juli 1997  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komplek Jondul V Blok R/2 Tabing, Padang  
No. HP / Telepon : 081363722477  
JudulSkripsi : Analisis *Flypaper Effect* Dan Kemampuan  
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera  
Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2019  
Yang menyatakan,



Della Jesica  
NIM.15060017

## ABSTRAK

**Della Jesica (2015/15060017): Analisis *Flypaper Effect* dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dengan Dosen Pembimbing Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Apakah terdapat pengaruh antara PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, (2) Apakah terdapat pengaruh antara DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, (3) Apakah terdapat pengaruh antara DBH terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, (4) Apakah terdapat pengaruh antara DAK terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, (5) Apakah terdapat pengaruh antara PAD, DAU, DBH, DAK secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, (6) Apakah terjadi *Flypaper effect* di Provinsi Sumatera Barat, (7) Bagaimana kondisi keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Model yang digunakan Model Regresi Panel. Pada analisis induktif terdapat beberapa uji yaitu; (1) Uji *Chow*, (2) Uji *Hausman*, (3) Uji *Langrange Multiplier*, (4) Uji Asumsi Klasik.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PAD terhadap Belanja Daerah, (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara DAU terhadap Belanja Daerah, (3) Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara DBH terhadap Belanja Daerah, (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara DAK terhadap Belanja Daerah. (5) terdapat hubungan antara PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah, (6) Bahwa dalam periode 2015-2017 dengan menggunakan model regresi panel, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Sumatera Barat, hal ini terjadi karena perbandingan koefisien regresi PAD terhadap jumlah koefisien regresi DAU, DBH, DAK  $> 1$ , (7) Bahwa dalam periode 2015-2017 kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran menunjukkan bahwa kondisi kemampuan daerah berada pada kuadran I terdapat 5 daerah, dimana PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerahnya mempunyai kemampuan mengambil potensi lokal. Pada kuadran II hanya terdapat 4 daerah, hanya satu daerah terdapat di kuadran III, dan 9 daerah pada kuadran IV, artinya perlu dipikirkan sebuah kebijakan dalam rangka mendukung upaya sektoral di daerah dengan tetap menjaga manajemen pengelolaan belanja APBD yang rasional.

Kata Kunci: Belanja Daerah, PAD, DAU, DBH dan DAK

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Flypaper Effect dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**”. Penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan, sehingga bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk menjadi lebih baik dikemudian hari. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis serta pihak-pihak terkait lainnya.

Selama berproses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ali Anis, Ms selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME selaku pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan motivasi serta arahan dan dengar sabar mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Orang tua yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik materi dan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan IE 15 dan seluruh pihak yang telah ikut memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Geng JULITAWATI (Tante Anna, Nadya Tiup, dan Desi Boang) yang paling setia menemani penulis saat susah maupun senang.
8. Kepada boyfriend Fahri Dani yang menemani penulis dalam membuat skripsi dan mendengarkan keluh kesah penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak atau pembaca yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan tulisan ini dimasa yang akan datang

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas kebaikan dari semua pihak.

Padang, Juli 2019

Della Jesica

Nim. 15060017

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>18</b>
A. Kajian Teori .....	18
1. <i>Flypaper Effect</i> .....	18
a. Pengertian .....	18
b. Teori Transfer.....	21
2. Belanja Daerah.....	22
3. Teori Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah .....	24
4. Teori Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah .....	26
5. Teori Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah.....	28
6. Teori Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah .....	29
7. Teori Kemampuan Keuangan Daerah.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Variabel Penelitian .....	41
F. Definisi Operasional.....	42
G. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	55
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	61
3. Analisis Induktif.....	74
B. Pembahasan.....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>102</b>

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat .....	4
Tabel 1.2 Realisasi PAD Kabupaten/Kota Sumatera Barat .....	6
Tabel 1.3 Realisasi DAU Kabupaten/Kota Sumatera Barat.....	8
Tabel 1.4 Realisasi DBH Kabupaten/Kota Sumatera Barat.....	11
Tabel 1.5 Realisasi DAK Kabupaten/Kota Sumatera Barat.....	12
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sumatera Barat .....	57
Tabel 4.2 Investasi Pemerintah Sumatera Barat Tahun 2015-2017.....	59
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat .....	60
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat .....	63
Tabel 4.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat	65
Tabel 4.6 Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Sumatera Barat ...	69
Tabel 4.7 Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Sumatera Barat.....	71
Tabel 4.8 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Sumatera Barat ..	73
Tabel 4.9 <i>Likelihood Test Ratio</i> .....	75
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman .....	76
Tabel 4.11 <i>Lagrange Multiplier</i> .....	77
Tabel 4.12 Uji Normalitas.....	78
Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas .....	79
Tabel 4.14 Uji Heterokedastisitas .....	81
Tabel 4.15 Estimasi <i>Common Effect Model</i> .....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 3.1 Peta Kemampuan Keuangan Daerah.....	54
Gambar 4.1 Pendeteksian Kemampuan Keuangan Daerah.....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data.....	112
Lampiran 2 Uji Chow.....	114
Lampiran 3 Uji Hausman .....	115
Lampiran 4 Uji LM .....	116
Lampiran 5 Uji Normalitas .....	116
Lampiran 6 Uji Multikolinearitas.....	117
Lampiran 7 Uji Heterokedastisitas.....	117
Lampiran 8 Model Regresi Panel.....	118
Lampiran 9 Distribusi Tabel t .....	119
Lampiran 10 Distribusi Tabel f.....	120

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **B. Latar Belakang Masalah**

Penerapan Otonomi daerah di Indonesia, yang hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD yang dipakai untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Permasalahan yang terjadi saat ini pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU diperoleh besar, maka pemerintah daerah agar berusaha pada periode berikutnya DAU diperoleh tetap porsi nominalnya. Menurut Ndadari dan Adi (2008) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2004) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai

belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat apakah terjadi indikasi *in efisien* pada dana transfer tersebut dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *Flypaper Effect*. Respon disini merupakan suatu tanggapan langsung dari pemerintah daerah dalam menyingkapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan yang diwujudkan pada anggaran belanja daerah. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan *flypaper effect* (Oates 2004).

*Flypaper Effect* itu sendiri merupakan respon yang tidak simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Tresch (2002) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan *flypaper effect* pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah.

Sumatera Barat merupakan provinsi yang sebagian besar daerahnya mengalami proses pemekaran secara tidak langsung berimbas pada proses penerimaan dana transfer (*grants*) dari pusat. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam berinovasi serta mengeksplorasi sumber-sumber alam yang terkandung di wilayah masing-masing, sehingga lambat laun ketergantungan pada pusat dapat dihilangkan,

seiring dengan adanya penambahan PAD. Realisasi pendapatan daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat jumlah dan kenaikan kontribusi PAD memiliki peranan dalam rencana peningkatan kemampuan dari segi keuangan agar tidak harus selalu bergantung pada pemerintah pusat.

Dipertegas kembali oleh Mardiasmo (2004), bahwa lemahnya perencanaan pengeluaran, sebagaimana yang telah dipaparkan, akhirnya memunculkan kemungkinan *under financing* atau *over financing*, yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan perencanaan belanja daerah adalah rendahnya kapabilitas program untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik serta tingkat efisiensi pelaksanaan belanja daerah yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya sebagai instrumen kebijakan dan manajemen secara optimal.

Maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, langkah penting yang harus dilakukan adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan anggaran pembangunan maka diharapkan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerahnya.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat**  
**(Tahun 2015- 2017)**

No	Kabupaten/Kota	2015 (Rp)	Laju (%)	2016 (Rp)	Laju (%)	2017 (Rp)	Laju (%)	Mean
1	Kab.Kep. Mentawai	646.392,068	-	840.151,506	29,98	990.803,893	17,93	825.782,489
2	Kab.Pesisir Selatan	1.143.199,497	-	1.359.853,635	18,95	1.500.649,148	10,35	1.334.567,427
3	Kab. Solok	948.937,934	-	1.052.446,452	10,91	1.185.171,233	12,61	1.062.185,206
4	Kab. Sijunjung	708.294,349	-	799.432,358	12,87	932.031,385	16,59	813.252,697
5	Kab. Tanah Datar	971.007,740	-	1.106.204,651	13,92	1.249.495,598	12,95	1.108.902,663
6	Kab.Padang Pariaman	1.045.817,153	-	1.165.716,252	11,46	1.336.323,358	14,64	1.182.618,921
7	Kab. Agam	1.095.888,612	-	1.246.915,570	13,78	1.354.815,611	8,65	1.232.539,931
8	Kab. Lima Puluh Kota	986.352,862	-	1.088.650,647	10,37	1.244.704,810	14,33	1.106.569,440
9	Kab. Pasaman	767.462,637	-	855.036,901	11,41	1.016.344,063	18,87	879.614,534
10	Kab. Solok Selatan	595.547,531	-	703.395,983	18,11	737.800,035	4,89	678.914,516
11	Kab. Dharmasraya	681.316,609	-	800.456,674	17,49	881.881,597	10,17	787.884,960
12	Kab. Pasaman Barat	835.376,469	-	909.853,752	8,92	1.060.377,597	16,54	935.202,606
13	Kota Padang	1.794.324,396	-	1.948.376,774	8,59	2.173.525,187	11,56	1.972.075,452
14	Kota Solok	452.972,592	-	477.740,630	5,47	548.992,336	14,91	493.235,186
15	Kota Sawahlunto	472.392,963	-	549.999,794	16,43	602.138,436	9,48	541.510,398
16	Kota Padang Panjang	406.617,041	-	491.459,795	20,87	548.861,093	11,68	482.312,643
17	Kota Bukittinggi	542.050,414	-	579.102,342	6,84	631.173,276	8,99	584.108,677
18	Kota Payakumbuh	593.640,727	-	694.205,053	16,94	741.093,594	6,75	676.313,125
19	Kota Pariaman	505.918,261	-	579.810,102	14,61	588.631,493	1,52	558.119,952
	<b>Mean</b>	<b>799.658,413</b>		<b>907.832,046</b>		<b>1.017.095,460</b>		<b>908.195,306</b>
	<b>Stdev</b>	<b>334.074,774</b>		<b>363.748,369</b>		<b>411.401,260</b>		<b>369.027,779</b>
	<b>Kv</b>	<b>41,78</b>		<b>40,07</b>		<b>40,45</b>		<b>40,63</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Sumatera Barat*

Tabel 1.1 menjelaskan realisasi belanja daerah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Diketahui bahwa Kota Padang merupakan Kota dengan angka belanja daerah paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Jumlah belanja daerah tertinggi di Kota Padang yakni pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 2.173.525,187.

Kemudian diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah Rp. 1.500.649,148. Dapat dilihat pula juga bahwa Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima puluh Kota, kabupaten Pasaman, dan Kabupeten Pasaman barat yang memiliki jumlah belanja daerah terbanyak. Disisi lain Koata Padang panjang merupakan kota dengan jumlah belanja daerah terkecil pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017.

Peningkatan bekanja daerah ini disebabkan karena pemerintah menyediakan layanan publik seperti sarana dan prasarana untuk kepentingan publik dan juga disebabkan karena kenaikan belanja langsung, serta didukung adanya kenaikan belanja tidak langsung. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pengembangan sumber penerimaan daerah akan berdampak pada jumlah dana transfer yang di terima oleh daerah, hal ini sangat di perlukan daerah untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Implikasi yang di timbulkan dari peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya adalah daerah tersebut secara fiskal mampu memenuhi kebutuhan pengeluarannya sehingga kesenjangan fiskal antar daerah dapat teratasi. Oleh

karena itu maka perlu upaya penguatan perpajakan daerah serta efektifitas pengeluaran karena jika hanya berpegang pada DAU, DBH, dan DAK saja akan mengakibatkan tidak optimalnya daerah dalam memaksimalkan potensi daerah.

Selain belanja daerah, PAD juga mampu untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah untuk program-program pelayanan publik. Belanja pemerintah daerah merupakan bentuk rangsangan atau stimulus yang dilakukan untuk memacu perkembangan perekonomian. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan didaerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauhmana tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan. Hasil dari PAD tersebut diarahkan agar dapat dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan cara campur tangan pemerintah.

Tabel 1.2 menjelaskan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Diketahui bahwa Kota Padang merupakan Kota dengan angka pendapatn asli daerah paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Jumlah pendapatan asli daerah tertinggi di Kota Padang yakni pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 359.469,406. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah Rp. 110.246,036. Dapat dilihat pula juga bahwa Kabupaten Pesisir Selatan

dan Kabupaten Agam yang memiliki jumlah pendapatan asli daerah terbanyak. Disisi lain Koata Pariaman merupakan kota dengan jumlah pendapatn asli daerah terkecil pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat**  
**(Tahun 2015- 2017)**

No	Kabupaten/Kota	2015 (Rp)	Laju (%)	2016 (Rp)	Laju (%)	2017 (Rp)	Laju (%)	Mean
1	Kab.Kep. Mentawai	33.747,862	-	42.784,854	26,78	41.948,183	-1,96	39.493,633
2	Kab.Pesisir Selatan	86.699,821	-	107.992,020	24,56	108.915,294	0,85	101.202,378
3	Kab. Solok	51.502,148	-	55.610,732	7,98	58.803,477	5,74	55.305,452
4	Kab. Sijunjung	54.261,421	-	65.008,435	19,81	76.833,967	18,19	65.367,941
5	Kab. Tanah Datar	99.694,237	-	112.072,727	12,42	118.971,143	6,16	110.246,036
6	Kab.Padang Pariaman	62.971,048	-	72.995,944	15,92	72.859,394	-0,19	69.608,795
7	Kab. Agam	79.418,016	-	90.197,210	13,57	102.597,442	13,75	90.737,556
8	Kab. Lima Puluh Kota	52.829,354	-	62.932,793	19,12	68.060,267	8,15	61.274,138
9	Kab. Pasaman	72.878,860	-	79.684,485	9,34	88.862,264	11,52	80.475,203
10	Kab. Solok Selatan	32.342,605	-	38.533,386	19,14	51.127,121	32,68	40.667,704
11	Kab. Dharmasraya	52.811,257	-	56.694,339	7,35	56.453,463	-0,42	55.319,686
12	Kab. Pasaman Barat	69.925,195	-	69.128,838	-1,14	91.174,717	31,89	76.742,917
13	Kota Padang	315.678,799	-	370.413,732	17,34	392.315,687	5,91	359.469,406
14	Kota Solok	29.522,681	-	36.630,731	24,08	42.117,207	14,98	36.090,206
15	Kota Sawahlunto	48.578,125	-	52.268,500	7,60	53.399,736	2,16	51.415,454
16	Kota Padang Panjang	51.601,386	-	67.035,654	29,91	70.357,124	4,95	62.998,055
17	Kota Bukittinggi	61.613,681	-	66.027,359	7,16	71.303,781	7,99	66.314,940
18	Kota Payakumbuh	65.900,626	-	100.646,557	52,72	87.445,115	-13,12	84.664,099
19	Kota Pariaman	26.677,826	-	29.897,289	12,07	29.680,784	-0,72	28.751,966
<b>Mean</b>		<b>70.981,839</b>		<b>82.976,610</b>		<b>88.590,851</b>		<b>80.849,767</b>
<b>Stdev</b>		<b>62.342,694</b>		<b>73.395,277</b>		<b>77.314,426</b>		<b>70.918,183</b>
<b>Kv</b>		<b>87,83</b>		<b>88,45</b>		<b>87,27</b>		<b>87,72</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Sumatera Barat

Selain itu PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. PAD merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi

yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Namun pada kenyataannya PAD masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Selain PAD dan perimbangan juga termasuk dalam mempengaruhi belanja daerah (DAU, DAK, dan DBH). Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Sedangkan tujuan utama pemberian dana perimbangan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistim perpajakan dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso dan suparta, 2015).

Pemerintah daerah juga memperoleh sumber pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan

atas konsep kesenjangan atau celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan alokasi dana yang dibutuhkan daerah untuk melaksanakan fungsi dasar sebagai penyedia layanan umum bagi masyarakat, sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Sumatera Barat**  
**(Tahun 2015- 2017)**

No	Kabupaten/Kota	2015	Laju	2016	Laju	2017	Laju	Mean
1	Kab.Kep. Mentawai	531.389,939	-	546.798,618	2,90	597.919,262	9,35	419.026,955
2	Kab.Pesisir Selatan	753.984,939	-	784.825,492	4,09	853.086,114	8,70	597.974,136
3	Kab. Solok	651.730,691	-	676.074,363	3,74	723.675,568	7,04	512.870,156
4	Kab. Sijunjung	498.591,200	-	516.685,152	3,63	558.382,085	8,07	393.414,609
5	Kab. Tanah Datar	650.563,368	-	667.139,623	2,55	707.992,904	6,12	506.423,974
6	Kab.Padang Pariaman	683.752,765	-	724.226,441	5,92	783.592,205	8,20	547.892,853
7	Kab. Agam	739.359,873	-	767.750,679	3,84	828.020,573	7,85	583.782,781
8	Kab. Lima Puluh Kota	700.183,206	-	725.615,816	3,63	760.431,504	4,80	546.557,632
9	Kab. Pasaman	542.067,878	-	562.775,575	3,82	606.741,992	7,81	427.896,361
10	Kab. Solok Selatan	406.540,345	-	433.585,911	6,65	488.996,271	12,78	332.280,632
11	Kab. Dharmasraya	445.128,175	-	477.807,496	7,34	507.913,222	6,30	357.712,223
12	Kab. Pasaman Barat	580.406,954	-	611.155,638	5,30	655.854,990	7,31	461.854,396
13	Kota Padang	1.060.917,648	-	1.072.429,395	1,09	1.120.046,168	4,44	813.348,303
14	Kota Solok	354.372,862	-	360.719,232	1,79	405.224,758	12,34	280.079,213
15	Kota Sawahlunto	332.780,291	-	344.941,712	3,65	381.838,808	10,70	264.890,203
16	Kota Padang Panjang	341.743,153	-	343.008,704	0,37	382.149,494	11,41	266.725,338
17	Kota Bukittinggi	404.285,567	-	408.640,651	1,08	458.968,842	12,32	317.973,765
18	Kota Payakumbuh	412.929,814	-	425.111,374	2,95	445.523,347	4,80	320.891,134
19	Kota Pariaman	386.256,228	-	389.745,497	0,90	422.666,213	8,45	299.666,985
	<b>Mean</b>	<b>551.420,258</b>		<b>570.475,651</b>		<b>615.211,806</b>		<b>434.276,929</b>
	<b>Stdev</b>	<b>187.169,884</b>		<b>192.080,315</b>		<b>197.539,579</b>		<b>144.097,837</b>
	<b>Kv</b>	<b>33,94</b>		<b>33,67</b>		<b>32,11</b>		<b>33,18</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Sumatera Barat

Tabel 1.3 menjelaskan realisasi dana alokasi umum di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Diketahui bahwa Kota Padang merupakan Kota dengan angka dana alokasi umum paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Jumlah danan alokasi umum tertinggi di Kota Padang yakni pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 813.348,303. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah Rp. 597.974,136. Dapat dilihat pula juga bahwa Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh yang memiliki jumlah dana alokasi umum terbanyak. Disisi lain Koata Sawahlunto merupakan kota dengan jumlah dana alokasi umum terkecil pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017.

Penerimaan DAU, dimana dalam beberapa tahun terakhir masih sangat dominan dalam porsi penerimaan daerah dan melebihi sumber penerimaan yang lain termasuk PAD. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit dari masing-masing pemerintah daerah untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Kecendrungan DAU inilah dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran khususnya pengelolaan sumber daya sendiri, oleh sebab itu jika DAU meningkat maka Belanja Daerah juga mengalami peningkatan.

Fenomena yang terjadi pemerintah daerah sering mengalokasikan dana dalam jumlah yang relatif besar untuk membiayai belanja rutin sehingga pelayanan publik menjadi terganggu karena alokasi yang digunakan untuk

program peningkatan kualitas pelayanan publik sangat minim dan selanjutnya akan berdampak pada belanja daerah.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah seharusnya mulai mengubah komposisi belanja yang dapat menambah jumlah aset tetap. Kebutuhan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah erat kaitannya dengan jumlah sarana dan prasana yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran penyediaan layanan publik yang memadai dan mendukung jalannya roda pemerintahan. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Selanjutnya dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah. Dimana dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain dari PAD, DAU dan DAK.

Halim (2004) menyatakan bahwa peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sasaran pembagunan daerah dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja dapat diterima dari DBH dan dikeluarkan dengan anggaran, alokasi, dan proporsi yang tepat.

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Sumatera Barat**  
**(Tahun 2015- 2017)**

No	Kabupaten/Kota	2015	Laju	2016	Laju	2017	Laju	Mean
1	Kab.Kep. Mentawai	24.687,359	-	24.750,522	0,26	27.452,345	10,92	25.630,075
2	Kab.Pesisir Selatan	23.969,053	-	21.475,887	-10,40	18.097,699	-15,73	21.180,880
3	Kab. Solok	20.572,172	-	18.209,462	-11,48	14.382,857	-21,01	17.721,497
4	Kab. Sijunjung	28.619,647	-	18.576,196	-35,09	17.087,123	-8,02	21.427,655
5	Kab. Tanah Datar	16.802,625	-	14.495,388	-13,73	15.670,215	8,10	15.656,076
6	Kab.Padang Pariaman	14.708,077	-	12.482,322	-15,13	12.442,895	-0,32	13.211,098
7	Kab. Agam	19.881,377	-	17.101,500	-13,98	20.530,109	20,05	19.170,995
8	Kab. Lima Puluh Kota	20.669,994	-	18.681,879	-9,62	19.665,366	5,26	19.672,413
9	Kab. Pasaman	17.399,271	-	16.779,942	-3,56	15.137,300	-9,79	16.438,838
10	Kab. Solok Selatan	30.845,910	-	21.655,750	-29,79	21.017,409	-2,95	24.506,356
11	Kab. Dharmasraya	27.747,425	-	23.905,825	-13,84	22.848,086	-4,42	24.833,779
12	Kab. Pasaman Barat	23.668,993	-	20.125,223	-14,97	30.046,749	49,30	24.613,655
13	Kota Padang	64.110,864	-	46.624,488	-27,28	63.579,570	36,37	58.104,974
14	Kota Solok	13.751,725	-	11.376,804	-17,27	12.066,178	6,06	12.398,236
15	Kota Sawahlunto	21.563,293	-	15.476,081	-28,23	12.562,337	-18,83	16.533,904
16	Kota Padang Panjang	12.115,273	-	11.047,831	-8,81	10.940,821	-0,97	11.367,975
17	Kota Bukittinggi	15.279,128	-	12.555,276	-17,83	15.127,937	20,49	14.320,780
18	Kota Payakumbuh	13.554,102	-	11.341,755	-16,32	12.412,466	9,44	12.436,108
19	Kota Pariaman	16.592,520	-	14.193,560	-14,46	14.224,900	0,22	15.003,660
<b>Mean</b>		<b>22.449,411</b>		<b>18.466,089</b>		<b>19.752,230</b>		<b>20.222,577</b>
<b>Stdev</b>		<b>11.449,889</b>		<b>8.022,692</b>		<b>11.837,272</b>		<b>10.256,449</b>
<b>Kv</b>		<b>51,00</b>		<b>43,45</b>		<b>59,93</b>		<b>50,72</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Sumatera Barat

Tabel 1.4 menjelaskan realisasi dana bagi hasil di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Diketahui bahwa Kota Padang merupakan Kota dengan angka dana bagi hasil paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Jumlah dana bagi hasil tertinggi di Kota Padang yakni pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 58.104,974. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jumlah Rp.

25.630,075. Dapat dilihat pula juga bahwa Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupten Pasaman Barat yang memiliki jumlah dana bagi hasil terbanyak. Disisi lain Koata Padanng Panjang merupakan kota dengan jumlah dana bagi hasil terkecil pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Hal ini disebabkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil yang diperoleh oleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi belanja daerah guna untuk meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan desentralisasi fiskal

Selanjutnya DAK mempengaruhi belanja daerah, dimana DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002).

**Tabel 1.5**  
**Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Sumatera Barat**  
**(Tahun 2016- 2017)**

No	Kabupaten/Kota	2015	Laju	2016	Laju	2017	Laju	Mean
1	Kab.Kep. Mentawai	77.535,765	-	106.007,765	36,72	161.683,838	52,52	115.075,789
2	Kab.Pesisir Selatan	107.565,620	-	124.757,160	15,98	266.889,269	113,93	166.404,016
3	Kab. Solok	90.839,880	-	108.682,800	19,64	229.110,956	110,81	142.877,879
4	Kab. Sijunjung	73.027,260	-	83.012,850	13,67	150.334,492	81,10	102.124,867
5	Kab. Tanah Datar	60.905,780	-	84.999,100	39,56	239.824,454	182,15	128.576,445
6	Kab.Padang Pariaman	108.209,250	-	129.270,130	19,46	332.332,843	157,08	189.937,408
7	Kab. Agam	73.233,820	-	104.313,130	42,44	259.204,726	148,49	145.583,892
8	Kab. Lima Puluh Kota	59.929,540	-	80.257,430	33,92	230.005,152	186,58	123.397,374
9	Kab. Pasaman	50.853,926	-	70.659,300	38,95	149.425,407	111,47	90.312,878
10	Kab. Solok Selatan	72.464,280	-	114.638,880	58,20	110.276,258	-3,81	99.126,473
11	Kab. Dharmasraya	70.880,630	-	102.807,090	45,04	210.035,494	104,30	127.907,738
12	Kab. Pasaman Barat	78.952,230	-	104.171,725	31,94	185.632,196	78,20	122.918,717
13	Kota Padang	57.262,403	-	50.026,350	-12,64	252.340,530	404,42	119.876,428
14	Kota Solok	32.287,100	-	43.582,850	34,99	90.881,308	108,53	55.583,753
15	Kota Sawahlunto	31.072,890	-	57.615,862	85,42	96.833,140	68,07	61.840,631
16	Kota Padang Panjang	23.879,790	-	27.138,016	13,64	68.629,780	152,89	39.882,529
17	Kota Bukittinggi	33.148,850	-	28.676,544	-13,49	73.733,088	157,12	45.186,161
18	Kota Payakumbuh	32.503,170	-	72.174,160	122,05	138.894,264	92,44	81.190,531
19	Kota Pariaman	38.438,430	-	49.605,640	29,05	96.738,396	95,01	61.594,155
<b>Mean</b>		<b>61.736,348</b>		<b>81.178,778</b>		<b>175.937,136</b>		<b>106.284,087</b>
<b>Stdev</b>		<b>25.505,009</b>		<b>31.674,981</b>		<b>76.580,360</b>		<b>41.453,034</b>
<b>Kv</b>		<b>41,31</b>		<b>39,02</b>		<b>43,53</b>		<b>39,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Sumatera Barat

Tabel 1.5 menjelaskan realisasi dana alokasi khusus di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan Kabupaten dengan angka dana alokasi khusus paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Jumlah danan alokasi khusus tertinggi di Kabupaten Padang

Pariaman yakni pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 189.937,408. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah Rp. 166.404,016. Dapat dilihat pula juga bahwa Kabupaten Agam, Kabupten Solok yang memiliki jumlah dana alokasi khusus terbanyak. Disisi lain Koata Padang Panjang merupakan kota dengan jumlah dana alokasi khusus terkecil pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Hal ini disebabkan karena pemerintah lebih fokus oleh realisasi dana alokasi umum, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa dana alokasi khusus ini dipergunakan hanya untuk kebutuhan yang dikatakan khusus.

Jadi berdasarkan data relalisasi Belanja Daerah, PAD, dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dimana laju belanja daerah pada tahun terakhir dimana total setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini diduga disebabkan pada penerimaan dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) . jika pertumbuhan dana perimbangan meningkat setiap tahunnya di lain hal PAD hanya mampu tuumbuh bebrapa persen dari belanja daerah hal ini dapat diindikasikan terjadinya *flypaper effect* dan kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola keuangan, untuk itu seharusnya pemerintah pusat membuat kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan kemampuan keuangan daerahnya. Begitu juga dengan peningkatan PAD secara langsung memberikan implikasi pada kemampuan keuangan daerah, jika PAD yang diterima lebih besar dari dana perimbangan maka daerah tersebut mandiri dan bisa mengelola keuangan daerahnya sendiri. Seperti yang diketahui bahwa DAU, DBH, DAK berpengaruh terhadap rencana pengeluaran pemerintah daerah yang

akan dilakukan, dimana hampir sebagian besar pemerintah daerah masih memanfaatkan penerimaan DAU, DBH, DAK untuk anggaran belanjanya. Hal ini mencerminkan masih adanya ketergantungan fiskal daerah dan akan terindikasi adanya *flypaper effect* dan kurang maksimalnya kemampuan keuangan daerah. Hal ini bisa diatasi jika daerah mampu memaksimalkan sumber penerimaan daerahnya sehingga tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat lambat laun bisa dihilangkan.

Berkaitan dengan keleluasaan pemerintah daerah dalam menggunakan dana perimbangan maka pemerintah daerah harus mampu menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, serta anggaran daerah harus mampu menampung dan mengakomodir berbagai aspirasi dan inisiatif masyarakat. Namun, kenyataannya menunjukkan masih lemahnya perencanaan pengeluaran yang dapat memunculkan kemungkinan *under financing* atau *over financing*, yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah. Masalah ini tentu dijumpai pula pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yang dapat menyebabkan terjadinya penggunaan belanja daerah yang cenderung tidak efisien atau adanya gejala *flypaper effect* dan kurangnya kemampuan keuangan daerah. Namun dugaan ini masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Anita Wulandari (2001) dan Fadhilah (2004) tentang kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Malang yang hasilnya kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Malang masih sangat rendah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Malang diharapkan bisa menggali

sumber-sumber pendapatan yang potensial. Sejalan juga dengan penelitian Maimunah (2006) serta Murniasih dan Mulyadi (2011), dimana dalam penelitian tersebut menemukan *flypaper effect* terhadap daerah yang diteliti.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini mencoba melakukan pengujian terjadinya *flypaper effect* dan kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan variabel dana transfer Dana Perimbangan(DAU,DBH,DAK) dan PAD. Pengujiannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai parameter variabel dana perimbangan(DAU,DBH,DAK) dengan nilai parameter variabel PAD terhadap belanja daerah dengan merujuk pada pengujian yang dilakukan oleh Anita Wulandari (2001), Fadhillah (2004), Maimunah (2006) serta Murniasih dan Mulyadi (2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis *Flypaper Effect* dan Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?

2. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
5. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
6. Apakah terjadi *flypaper effect* di Provinsi Sumatera Barat?
7. Bagaimana kondisi kemampuan keuangan daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
6. Kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah di Sumatera Barat
7. Menganalisis gambaran kondisi keuangan daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi publik yang membahas masalah yang berkaitan.
3. Bagi pemerintah daerah, untuk membantu sebagai bahan perbandingan dan masukan untuk membuat kebijakan yang terkait.
4. Bagi penelitian selanjutnya, yakni sebagai referensi dalam mengkaji masalah yang berkaitan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Flypaper Effect*

##### b. Pengertian

Istilah *flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “*money stick where it hits*”. Sejauh ini belum ada padanan kata *flypaper effect* dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana tanpa adanya diterjemahkan. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Siagan 2009).

Menurut Sagbas dan Saruc (2008) ada dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *Flypaper Effect* yang sering digunakan yaitu *Fiscal illusion* dan *The bureaucratic model*. Teori *Fiscal illusion* sebagai sumber *Flypaper Effect* mengemukakan bahwa Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Anomali yang timbul tersebut menghasilkan dua aliran pemikiran dari para pengamat ekonomi mengenai telaah *flypaper effect*, yakni model

birokratik (*bureaucratic model*) dan model ilusi fiskal (*fiscal illusion model*) Sagbas dan Saruc (2008).

Terdapat Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia terkait dengan *Flypaper effect* seperti penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) yaitu *flypaper effect* atau efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD (Maimunah 2006). Karena itu *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan PAD.

Pada model *The bureaucratic, Flypaper Effect* adalah hasil dari perilaku memaksimalkan anggaran oleh para birokrat (atau politisi lokal), yang lebih mudah menghabiskan transfer/hibah daripada meminta kenaikan pajak, Sagbas dan Saruc (2008). Dan pada model ini *Flypaper Effect* dapat terjadi karena kekuasaan dan pengetahuan birokrat atau pemerintah daerah akan anggaran dan tranfer pemerintah.

Menurut Kang dan Setyawan (2012) birokrat memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan publik. Dia menduga bahwa birokrat akan berperilaku untuk memaksimalkan anggaran sebagai bentuk dari kekuasaan mereka. Secara implisit, model *The bureaucratic* ini mendukung *Flypaper Effect* sebagai konsekuensi dari perilaku birokrat

yang bebas menghabiskan transfer (hibah) daripada menaikkan pajak, dikarenakan kenaikan pajak dianggap program yang tidak populer di mata para pemilih atau penduduk daerah.

Model ilusi fiskal (*fiscal illusion model*) pertama kali dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Amilcare Puviani yang menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Penjelasan dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak atau retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang lebih besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Hastuti (2011) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensiasi. Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Pengaruh transfer bersyarat pada

konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Jika, harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Dengan adanya hal tersebut, maka kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak (Adiputra 2014).

### **c. Teori Transfer**

Berdasarkan pendapat Rosen dan Boex (2001) bahwa bantuan (*grants tranfer*) dikelompokan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Bantuan bersyarat (*conditional grants*), bantuan ini sering disebut juga *categorical grants* atau *spesific grants* yang terdiri atas bantuan penyeimbang (*non-matching grants*). Bantuan penyeimbang terdiri atas bantuan penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*) dan bantuan penyeimbang terbatas (*closed ended matching grants*).
- 2) Bantuan tidak bersyarat (*unconditional grants*) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada syarat tertentu, artinya pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah yang bersangkutan tanpa ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bantuan tanpa syarat ini biasanya

ditentukan berdasarkan formula pemerataan (*equalization formula*) yang mengukur kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

3) Bantuan bagi hasil (*revenue sharing*)

## **2. Belanja Daerah**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada dilembaga yang berbeda. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bapeda (Bagian Penyusunan program dan Bagian Keuangan). (Dedi Haryadi,2001), selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja disektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002) mengemukakan bahwa: “Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana.” Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah, yaitu “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang berupa arus kas aktiva keluar, deplesi aktiva atau timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada milik ekuitas dana (rakyat).

Pada dasarnya pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, pemerintah daerah juga memiliki kedudukan yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang menjadi sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi

belanja pada berbagai tingkat pemerintahan. Menurut Tampubolon (2011), secara teoritis terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi. Sedangkan menurut “pendekatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik.

a. **Klasifikasi Belanja Daerah**

Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi seperti dibawah ini:

- 1) Belanja Rutin
- 2) Belanja Pembangunan

Rumus yang digunakan untuk menghitung belanja daerah:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Tidak Langsung} + \text{Belanja langsung....( 2 )}$$

**3. Teori Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situngkir dan Manaring (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber Penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) semua penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber PAD terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Metayani et al (2012) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan asli daerah yang diterima. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pendapatn asli daerah maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah. Penelitian Haryo Kuncoro (2007), Siagan (2009) dan Adiputra (2014) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah disebut dengan *tax-spend hypotesis* (saputri 2011). Hipotesis ini

mengandung makna bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Mayasari (2004) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah, dimana besar kecilnya belanja daerah akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja daerah, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya

#### **4. Teori Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih kecil (Mardiasmo 2004).

Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Widodo 2007):

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Mentayani et al (2012) menjelaskan bahwa transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya belanja daerah yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan jangka pendek yang dibuat oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima. Puspita Sari (2010), Derwanto (2007) mengemukakan bahwa Dana Alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat

sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Solikin (2010) menyatakan bahwa keterkaitan antara Dau terhadap belanja daerah, semakin tinggi DAU maka alokasi untuk belanja daerah juga akan meningkat. Hal ini disebabkan jika daerah memiliki alokasi DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah akan meningkat.

## **5. Teori Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah**

Dana bagi hasil dapat bersumber dari pajak dan SDA. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan, pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21.

Menurut Carol J.pierce (2005) menyatakan bahwa : “Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan *vertical* antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan *fiscal* pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan & standar minimum, & merangsang mobilisasi pendapatan”.

Kaitan antara DBH dengan belanja daerah yaitu dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah melihat

angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004/ PP Nomor 55 Tahun 2005) angka persentase yang dimaksud adalah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sumber dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh pada Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil merupakan yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja. Penelitian terdahulu, Indra Syahputra (2010) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi besarnya Belanja Daerah (Berpengaruh Positif). Rona (2015) mengatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dana bagi hasil yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Indah (2001) mengemukakan bahwa bagi hasil pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah dalam hal ini

disebabkan karena besarnya bagi hasil pajak ditentukan oleh pemerintah tanpa kesepakatan dengan pemerintah daerah.

## **6. Teori Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tidak semua daerah di Indonesia memperoleh tambahan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus dialokasikan dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah tertentu serta mencapai tujuan kegiatan atau program tertentu sesuai skala nasional.

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Ardhani 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja daerah.

. Soeratno (2005-2009) memperoleh hasil yaitu bahwa secara simultan Dana Alokasi Khusus (DAK) berimplikasi secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin besar dana alokasi khusus

sebagai sumber penerimaan daerah maka semakin besar dana yang dikeluarkan untuk belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pemberian dana diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tertentu bagi daerah yang menerima dana alokasi khusus.

Halim (2003) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja daerah . DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan -kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Holtz -Eakin et al (1995), yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara Dana Alokasi Khusus (DAK) belanja daerah

## **7. Teori Kemampuan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007) yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang hal tersebut belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi kedudukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan keuangan daerah adalah semua

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa barang dan uang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam penjelasan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, ditegaskan bahwa manajemen keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada regulasi, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan asas keadilan (Kuncoro, 2004).

Dalam Mahmudi (2010), dijelaskan bahwa reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dikatakan cukup terlambat jika dibandingkan beberapa negara lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura serta Selandia Baru, sudah sejak akhir tahun 1970an dan 1980an melakukan rangkaian reformasi di bidang manajemen keuangan publik. Penganggaran berbasis kinerja misalnya, Singapura sudah menjalankan sejak awal 1980an, sementara di Indonesia baru diperkenalkan tahun 2001. Namun demikian perjalanan reformasi manajemen keuangan di Indonesia boleh dikatakan termasuk yang paling progresif kemajuannya (Yatiman & Arif Pujiyono, 2013).

Reformasi manajemen keuangan daerah di dalam (Policy Brief Kemenkeu, 2012) dianggap memiliki hubungan sebab akibat yang signifikan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut. Perbaikan manajemen keuangan daerah akan mendukung keberhasilan kebijakan otonomi daerah dan sebaliknya otonomi daerah yang konsisten

akan mendorong terjadinya perubahan manajemen keuangan daerah. Terlebih apabila dikaitkan dengan perubahan paradigma pencapaian tujuan pembangunan di daerah dari yang semula bersifat makro ekonomi semata (*first fundamental theory of welfare economics*) menuju pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berimbang (*second fundamental theory of welfare economics*) (Sagala & Parmadi, 2013)

## **B. Penelitian Terdahulu**

Murniasih dan Mulyadi (2011), yang dalam penelitiannya mengidentifikasi *flypaper effect* belanja daerah antar pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan variabel PAD dan dana transfer (DAU dan DAK) dengan periode analisis tahun 2005-2011. Dengan menggunakan metode *Pool Least Square* disimpulkan bahwa tingkat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari dana transfer (DAU dan DAK) lebih tinggi dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa terjadi gejala *flypaper effect* pada pengelolaan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengidentifikasi *flypaper effect* dengan menggunakan variabel PAD, DAU, DAK. Perbedaan dalam penelitian ini menambahkan variabel DBH dan juga mendeteksi kemampuan keuangan daerah

Sagbas dan Saruc (2004) yang dalam penelitiannya mengidentifikasi *flypaper effect* antar pemerintah daerah turki. Analisis *flypaper effect* dilakukan dengan menggunakan dasar teori *fiscal illusion* dan

*bueraucratic model*. Hasil penelitiannya menyimpulkan dana transfer antar pemerintah daerah dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah dengan tingkat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari dana transfer (*lumpsum*) lebih tinggi dibanding pendapatan daerah. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengidentifikasi *flypaper effect*. Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel PAD, DAU, DBH, DAK dan juga mendeteksi kemampuan keuangan daerah.

Gorodnichenko (2001) dalam penelitiannya mengenai fenomena *flypaper effect* dalam perubahan dan pengalokasian transfer pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan dan perekonomian Ukraina. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa respon pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih elastis dibandingkan respon pengeluaran pemerintah terhadap alokasi transfer pemerintah pusat. Hasil dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada kinerja pengeluaran pemerintah daerah dalam merespon alokasi transfer. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel PAD dan juga mendeteksi *flypaper effect*. Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel, DAU, DBH, DAK dan juga mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah.

Maimunah (2006) yang menganalisis *flypaper effect* belanja daerah di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menganalisis *flypaper effect* belanja daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia, serta Armawaddin (2015) yang menganalisis *flypaper effect*

belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketiga peneliti tersebut menyimpulkan bahwa terdapat *flypaper effect* belanja daerah pada Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitiannya. Sebaliknya, penelitian Pramuka (2010) serta Putra dan Dwirandra (2015), yang juga menganalisis gejala *flypaper effect* belanja daerah Kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali dalam penelitiannya, malahan justru tidak menemukan terjadinya *flypaper effect*. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel PAD, DAU dan juga mengidentifikasi *flypaper effect*. Perbedaan penelitian ini menambahkan variabel DBH, DAK dan juga mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah.

Susanto (2014) yang menganalisis kemampuan keuangan daerah pemerintah di Provinsi NTB. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, kontribusi PAD(*share*) terhadap total pendapatan daerah provinsi NTB rendah, meskipun pertumbuhan PAD tinggi. Selain itu klarifikasi berdasarkan tingkat kriteria, provinsi NTB adalah provinsi dengan kemampuan finansial yang tinggi. Perasamaan dalam penelitian ini sama mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan variabel PAD. Perbedaan penelitian ini menambahkan variabel DAU, DBH, DAK dan juga mengidentifikasi *flypaper effect*.

Haryonto (2017), yang menganalisis analisis perbandingan peta kemampuan keuangan daerah penghasil SDA dan non SDA di Jawa Barat dengan era desentralisasi fiskal, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa ,

daerah penghasil SDA memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan daerah non SDA. Dari analisis metode kuadran hanya kabupaten bandung yang masuk kudran I, berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah wajib memfokuskan kebijakan transfer, sehingga kedepannya mereka dapat melakukan berbagai perbaikan menuju kondisi yang lebih baik. Persamaan penelitian ini sama-sama mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel PAD, DAU, DBH, DAK dan mengidentifikasi *flypaper effect*.

Maqsuro (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kinerja fiskal ditandai dengan tingginya nilai elastisitas. Berdasarkan metode kuadran menunjukkan bahwa kondisi kapasitas fiskal terhadap pengeluaran daerah di Jawa Tengah berada pada kuadran II ada 9 daerah dan 26 daerah berada pada kuadran IV pada belanja daerah. Persamaan penelitian ini sama-sama mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini menambahkan variabel PAD, DAU, DBH, DAK dan juga mengidentifikasi *flypaper effect*.

Basri (2013) yang menganalisis tentang kinerja PAD dan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, dimana hasilnya menyimpulkan bahwa sumber dari PAD yang terbesar berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan komposisi terbesar dari APDB berasal dari dana perimbangan. Kemmpuan keuangan daerah di Provinsi Jambi hanya daerah Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi, dan

Kabupaten Sarolangun yang menempati kuadran I yang artinya daerah tersebut memiliki kemampuan daerah yang tinggi dibanding Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel PAD dan mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini menambahkan variabel DAU, DAK, DBH dan juga mengidentifikasi *flypaper effect*.

Dengan merujuk pada penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini melakukan analisis *flypaper effect* dan kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan variabel (PAD, DAU, DAK, dan DBH). Perbedaan penelitian ini dengan beberapa peneliti terdahulu adalah pada 2 model penelitian.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan, keterkaitan ataupun antar variabel yang diteliti berpijak pada teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat” digunakan beberapa variabel yang terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemampuan dalam hal keuangan daerah, dimana pemerintah daerah

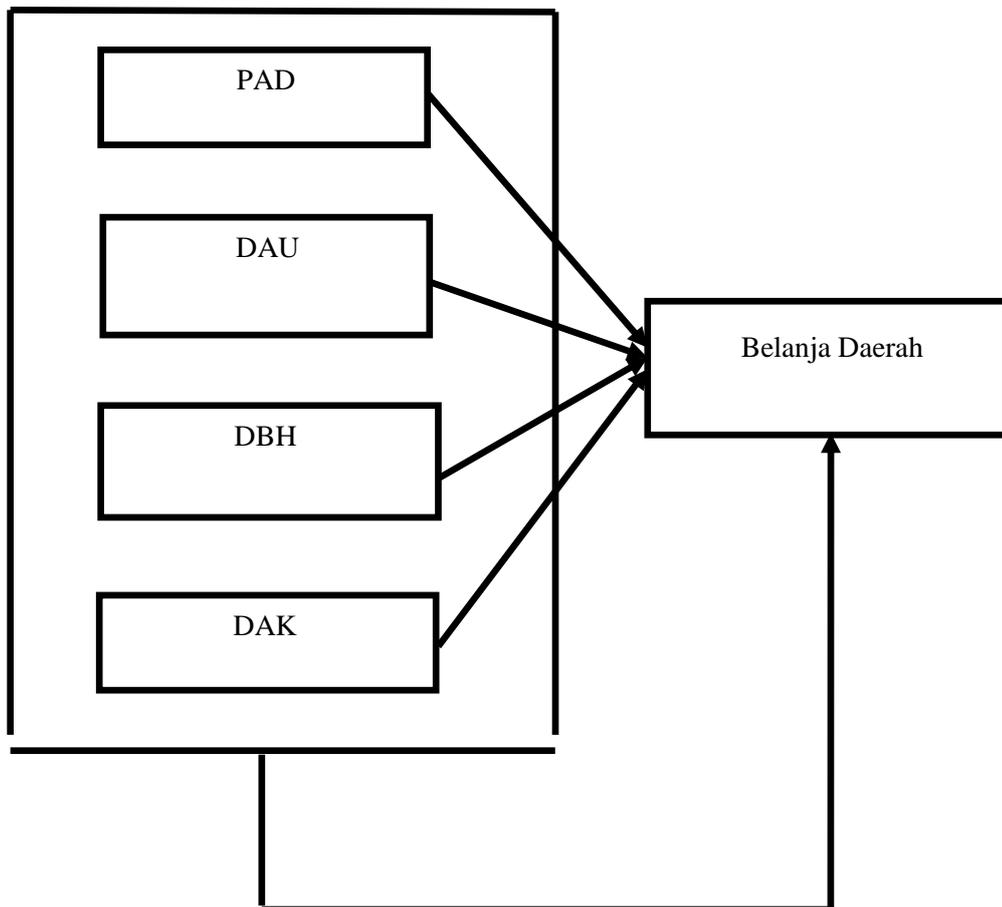
diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dalam hal ini jika PAD meningkat maka, dana yang dikelola untuk pembangunan juga mengalami peningkatan, dalam arti semakin besar pendapatan yang di dapat, maka tingkat pengeluaran akan bergerak meningkat, sehingga ada kecenderungan untuk menghabiskan dan anggaran daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu fungsi dana alokasi umum (DAU) untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga distribusi dana alokasi umum (DAU) kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Demikian pula dengan pendapatan asli daerah yang mempunyai inti tujuan untuk menekan ketergantungan daerah akan transfer dana alokasi umum., sehingga secara perlahan-lahan pengalokasian dana alokasi umum dapat dikurangi seiring kemampuan fiskal daerah dan pada akhirnya terjadinya *flypaper effect* dapat dihindari.

Semakin baik DBH suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja daerah. Ketika DBH besar maka kebutuhan akan sarana dan

prasarana penunjang aktivitas daerah pun juga semakin banyak. Sehingga dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan porsi belanja daerah yang lebih banyak lagi.

Dana alokasi khusus dialokasikan dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah tertentu serta mencapai tujuan kegiatan atau program tertentu sesuai skala nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pemberian dana diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tertentu bagi daerah yang menerima dana alokasi khusus.



## Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Barat.

$$H_o : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Barat.

$$H_o : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Barat.

$$H_o : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Barat.

$$H_o : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$H_a$  = salah satu koefisien regresi  $\beta_1 \neq 0$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2015-2017 ini berfokus pada Analisis Flypaper Effect dan Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Berdasarkan pembahasan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah menggunakan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Sumatera Barat. Pendapatan Asli Daerah ini akan berdampak pada Belanja Daerah. Artinya ketika peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Selain itu meningkatnya pendapatan asli daerah juga berdampak pada perekonomian di Sumatera Barat yang bisa menurunkan beberapa persen angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan.
2. Dana Alokasi Umum dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Sumatera Barat. Peningkatan Dana

Alokasi Umum akan mampu meningkatkan Belanja Daerah di Sumatera Barat, semakin besar Dana Alokasi Umum maka belanja daerah akan semakin besar pula. Dengan adanya peningkatan Dana Alokasi Umum ini akan mendukung peningkatan pelayanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

3. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah karena semakin besar dana bagi hasil maka akan menutupi celah fiskal yang ada di daerah.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, semakin besar DAK maka belanja daerah akan semakin besar pula agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
5. Dalam jangka panjang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus merupakan faktor pendorong Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
6. Bahwa dalam periode 2015-2017 dengan menggunakan model regresi panel, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Sumatera Barat hal ini terjadi karena nilai koefisien regresi PAD terhadap koefisien regresi DAU, DBH dan DAK di dapat nilai  $< 1$ . Artinya pemerintah masih kurang menggali sumber-sumber potensi di daerah tersebut.
7. Bahwa dalam periode 2015-2017 kemampuan keuangan daerah menggunakan metode kuadran menunjukkan bahwa kondisi kemampuan

keuangan daerah berada pada kudran II sebesar 4 daerah. Sedangkan pada kuadran I terdapat 5 daerah dimana PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerahnya mempunyaoi kemampuan mengembangkan potensi lokal. Pada kuadran IV terdapat 9 daerah, seta hanya terdapat satu daerah pada kuadran III. Artinya perlu dipikirkan sebuah kebijakan dalam rangka mendukung upaya hijrah sektoral di daerah dengan tetap menjaga manajemen pengelolaan belanja APBD yang rasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang di peroleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah daerah lebih menggali potensi daerah agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga anggaran untuk Belanja Daerah lebih berkurang.
2. Hendaknya pemerintah daerah diharapkan agar tidak bergantung pada DAU untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan.
3. Hendaknya pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi DBH untuk bisa memenuhi kebutuhan daerah.
4. Hendaknya pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah yang memerlukan dukungan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana.

5. Untuk Sumatera Barat yang terindikasi adanya *flypaper effect* diharapkan lebih bisa meningkatkan PAD per daerah.
6. Untuk Kabupaten/Kota Yang menempati Kudaran II, III, IV diharapkan keluar dari lingkaran tersebut dan gunakan kekayaan daerah sebagai investasi pengembangan.
7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menambah variabel atau indikator yang lain yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah di Sumatera Barat.
8. Bagi para akademisi dan perguruan tinggi sekiranya juga dapat mendukung berbagai upaya yang sedang menjadi pekerjaan besar pemerintah pusat dalam menciptakan pola desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang lebih efisien dan efektif. Perlu diingat bahwa aspek manajemen pengelolaan belanja daerah yang berkualitas dapat dimulai dari exercise di level akademik, dan di saat bersamaan perguruan tinggi juga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparat pemerintah daerah masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2002). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Adiputra, I M.P. 2014. “*Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem*”. Jurnal Ilmiah dan Humanika Volume 3 Nomor 2. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Armawaddin, M. 2015. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) UHO*, 16,13-19.
- BPS (Statistik Keuangan Sumatera Barat). “*Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2007-2017*”. Provinsi Sumatera Barat : BPS.
- \_\_\_\_\_. “*Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2007-2017*”. Provinsi Sumatera Barat : BPS.
- \_\_\_\_\_. “*Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2007-2017*”. Provinsi Sumatera Barat : BPS.
- Boex, Jameson. 2001. *An Inductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relation*: Word Bank Institute.
- Basri, hasan. (2013). Analisis Kinerja PAD dan Kemampuan Keuangan daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.2. No.2
- Colfer, Carol J Pierce & Capistrano, Doris. 2005. *Politik Desentralisasi, Kekuasaan dan Pengalaman di Berbagai Negara*. Jakarta.